PERAN SATUAN TUGAS GARUDA BHAYANGKARA MELALUI MINUSTAH PBB DALAM MISI STABILISASI DI HAITI

Rivaldy Mardian

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Jalan Dipati Ukur No. 112 Bandung 40132 Indonesia

Email : aldy_demagician@yahoo.com

ABSTRAK

MINUSTAH didirikan sesuai Resolusi Dewan Keamanan 1542 tanggal 30 April 2004 untuk mendukung pemerintahan transisi dalam memastikan lingkungan yang aman dan stabil untuk membantu dalam pemantauan, restrukturasi dan mereformasi polisi nasional Haiti, untuk membantu dengan komprehensif dan berkelanjutan pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (*Disarmament, Demobilization and Reinteg ration*), untuk membantu dengan pemulihan dan pemeliharaan aturan hukum. Personil Polri dalam misi perdamaian PBB di Haiti bertugas sebagai *Police Adviser* sesuai dengan mandat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1542, Resolusi Nomor 1908, Resolusi Nomor 1927 dan diperbaharui dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1944 yang menyatakan untuk turut serta menciptakan dan memelihara lingkungan yang aman dan stabil, membantu proses politik (Pemilihan Umum Haiti) dan menciptakan penegakan HAM di Haiti.

Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa perubahan Indonesia melalui Polri telah turut serta dalam misi perdamaian PBB MINUSTAH dan Dalam rentan waktu 2010-2015 Indonesia memberangkatkan Satuan Tugas Garuda Bhayangkara I, Satuan Tugas Bhayangkara II dan Satuan Tugas Garuda Bhayangkara III ke MINUSTAH dengan tugas yang berbeda-beda sesuai dari mandat *UN Police*.

Kata Kunci : Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Minustah, Satuan Tugas Garuda Bhayangkara

ABSTRACT

MINUSTAH established appropriate Security Council resolution 1542 on 30 April 2004 to support the Transitional Government in ensuring a secure and stable environment to assist in monitoring, restrukturasi and reforming the Haitian National Police, to help with comprehensive and sustainable disarmament, demobilization and reintegration (Disarmament, Demobilization and Reintegration), to help with the restoration and maintenance of the rule of law. Personnel of the national police in the UN peacekeeping mission in Haiti served as Police Adviser in accordance with the mandate on the UN Security Council resolution 1542, resolution Number Number Number Resolution 1908, 1927 and refurbished with a UN Security Council resolution Number 1944 stating to participate create and maintain a secure and stable environment, political process help (Haitian Elections) and create the enforcement of human rights in Haiti.

The results indicate that Indonesia change conclusions through the national police has participated in the UN peacekeeping mission MINUSTAH and vulnerable In the 2010-2015 time Indonesia sent a task force of Garuda Bhayangkara Bhayangkara

task force I, II and III of the Bhayangkara Garuda task force to MINUSTAH with the task varies according from the mandate of the UN Police.

Keywords: *International Relations Division Of The National Police, Minustah Headquarters, A Task Force Of Garuda Bhayangkara*

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, dalam menjalankan hidup manusia memerlukan bantuan orang lain. Maka, manusia harus bekerja sama, saling tolong-menolong, dan hidup dengan damai. Namun, kadang terjadi benturan kepentingan dalam mencapai tujuannya. Demikian pula halnya dengan negara yang ingin bekerja sama dengan negara lain, adakalanya benturan kepentingan pun tidak dapat dihindari.

Pemberontakan terhadap sebuah pemerintahan merupakan sebuah dinamika yang sering ditemui jika berbicara dalam konteks hubungan internasional. Akibat dari benturan kepentingan, terkadang dapat menimbulkan konflik Bersenjata atau peperangan. Setiap peperangan selalu menimbulkan kehancuran, baik di pihak yang menang maupun yang kalah. Bahkan banyak perang yang mengakibatkan lenyapnya sebuah bangsa atau negara.

Akibat perang yang merusak segala sendi kehidupan, maka manusia memikirkan tentang perdamaian yang kekal dan abadi. Upaya menghindari peperangan yang mengancam kehidupan manusia diusahakan dengan membentuk suatu lembaga perdamaian dan merupakan persatuan seluruh bangsa atas dasar kehendak bebas setiap negara untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban bersama.

Berdasarkan pemikiran tersebut, pada tanggal 14 Agustus 1941 Perdana Menteri Inggris Winston Churchill (1940-1945) dan Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32, mengadakan pembicaraan khusus di atas kapal perang Kerajaan Inggris HMS *Prince of Wales* (53) di perairan Samudera Atlantik, tepatnya di wilayah Argentia, Newfoundland, Kanada yang menghasilkan sebuah piagam yang dikenal dengan Piagam Atlantik *(Atlantic Charter)*. Dalam Piagam Atlantik terdapat 8 poin penting mengenai : Tidak ada lagi wilayah yang dicari oleh Amerika Serikat atau Inggris, Pengaturan sebuah wilayah harus sesuai dengan kehendak masyarakat bersangkutan, Hak untuk menentukan nasib sendiri, pengurangan rintangan perdagangan, memajukan kerjasama ekonomi dunia dan peningkatan kesejahteraan sosial, kebebasan berkehendak dan bebas dari kekhawatiran, menciptakan kebebasan di

laut lepas, dan pelucutan senjata di seluruh dunia pasca perang Pokok-pokok Piagam Atlantik itu pada tanggal 14 Agustus 1941 menjadi dasar konferensi-konferensi internasional dalam menyelesaikan perang dunia kedua dan menuju pembentukan PBB.

Pemeliharaan keamanan antar negara terbagi menjadi tiga generasi yang berbeda. Generasi pertama yakni disebut tradisional pada era perang dingin. Generasi tradisional lebih dimanfaatkan untuk meredam dua kubu dengan cara terus memantau keadaan dan membatasi poliferasi nuklir hingga PBB mulai membentuk suatu badan khusus di akhir tahun 1990. Generasi kedua merupakan generasi yang lebih fokus kepada langkah-langkah penyelesaian konflik sipil, terutama di benua Amerika, Afrika dan Asia. Generasi ini melawan banyak pelanggaran hak asasi yang menguji kestabilan keamanan. Generasi ketiga merupakan generasi yang menghadapi masalah keamanan kompleks seperti perlindungan terhadap munculnya kejahatan genosida dan konflik negara. Oleh karenanya, generasi ini membekali diri mereka dengan *military powers*. Pemelihara keamanan di tiga generasi ini ternyata dimotori oleh orang-orang kelompok epistemic yang sangat mendukung keamanan internasional. Mereka memberikan hasil pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan kepada Dewan Keamanan untuk membentuk suatu keputusan yang tepat

Dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional, Misi Pemeliharaan Perdamaian *(Intenational Peacekeeping Operation)* merupakan *flagship enterprise* (Usaha/tujuan berdirinya) PBB. Misi Pemeliharaan Perdamaian pertama kali dilaksanakan pada tangal 29 Mei 1948, berdasarkan resolusi 50, tahun 1948, mengirimkan tim pengamat yang tergabung dalam *United Nations Truce Supervision Organization* (UNSTO) ke Palestina untuk menjaga genjatan senjata antara Israel dengan Negara-Negara Arab. Terhitung pada tanggal 29 februari 2016, PBB sedang melaksanakan 16 operasi MPP di seluruh dunia dengan jumlah personel sebanyak 122.778 orang. Dari angka itu, 104.503 orang merupakan personel berseragam (militer dan polisi) yang berasal dari 124 negara. Secara keseluruhan sejak 1948, PBB telah melaksanakan 71 MPP diseluruh dunia.

Pada awalnya peran MPP PBB hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan sehingga usaha-usaha politik untuk menyelesaikan konflik dapat dilakukan. Namun, dengan berakhirnya perang dingin, konteks penggelaran MPP PBB juga berubah dari misi “tradisional” yang

mengedepankan tugas-tugas militer, menjadi misi yang lebih "multidimensional" dalam rangka mengimplementasikan perjanjian damai secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan melalui kegiatan asistensi untuk membangun institusi pemerintahan, pengawasan hak asasi manusia, reformasi sektor keamanan serta kegiatan perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi eks-kombatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarksan dari latar belakang di atas masalah dari penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah Mayor

Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut: **"Bagaimana peran Satuan Tugas Garuda Bhayangkara melalui MINUSTAH PBB dalam Misi Stabilisasi Di Haiti ?**.

2. Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan minor, dimana dalam mengukur sebuah kerjasama dan sebuah organisasi dapat dilakukan dengan menekankan pada pencapaian organisasi dalam mencapai tujuannya. Dimana tujuan *police adviser* adalah sebagai suatu unit kesatuan keamanan yang terdiri dari beberapa personil polisi dari berbagai Negara yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan menstabilkan keadaan di Negara konflik berdasarkan mandat pada periode tahun 2010 sampai dengan 2015 yang di keluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada konflik di Haiti (MINUSTAH). Rumusan tersebut berupa:

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Satgas Garuda Bhayangkara dalam misi stabilitas PBB di Haiti ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Satgas Garuda Bhayangkara sebelum dan ketika bertugas pada misi stabilitas PBB di Haiti periode 2010-2015 ?
3. Bagaimana kondisi stabilitas keamanan di Haiti setelah datangnya Satgas Garuda Bhayangkara ?

C. Tinjauan Pustaka

Untuk mempermudah proses penelitian dan pembahasan, penulis menggunakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori atau pendapat para ahli yang

mempunyai kaitan dengan objek penelitian, dimana teori-teori dan konsep-konsep para ahli tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis, yang akan diuji kebenarannya.

1. Hubungan Internasional

Dalam hal ini hubungan internasional adalah sebagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, politik, geografi, sosiologi, dan lain-lain yang dalam kajiannya terkait dengan masalah sosial. Hubungan internasional menjadi penting saat ini karena negara tak dapat hidup sendiri dan memisahkan diri dari dunia internasional, dalam hal ini Holsti member deskripsi tentang pengertian hubungan internasional seperti dibawah ini seperti dibawah ini :

> "Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi di antara masyarakat Negara-negara,baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga Negara. Dan meliputi lembaga perdagangan internasional dan perkembangan etika internasional" (Holsti, 1992: 26).

Hubungan internasional seperti kata Mochtar Mas'oed memberikan gambaran mengenai hubungan internasional, sebagai berikut:

"Hubungan Internasional itu sangat kompleks karena didalamnya terlibat bangsa-bangsa yang berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan kelompok manusia di dalam suatu Negara. Hubungan internasional juga sangat kompleks karena setiap segi hubungan itu melibatkan berbagai semi lain yang koordinasinya tidak sederhana " (Mochtar Mas'oed, 1987 : 27).

2. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi hubungan internasional. Menurut Plano, pengertian politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral (Perwita & Yani, 2005 : 49).

Sementara itu, adapun tujuan dari politik luar negeri itu sendiri yang sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengartikan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk menjangkaunya.

Sumber-sumber politik luar negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal baik dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Howard Lentner mengklasifikasikannya kedalam dua kelompok, yaitu determinan luar negeri dan determinal domestik. Determinan luar negeri mengacu pada keadaan *sistem internasional* dan *situasi* pada suatu waktu tertentu. Determinan domestik menunjuk pada keadaan di dalam negeri yang terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan waktu untuk berubah yaitu *highly stable determinants, moderately stable determinants,* dan *unstable determinants* (Howard Lentner,1974:105).

D. Kerangka Pemikiran

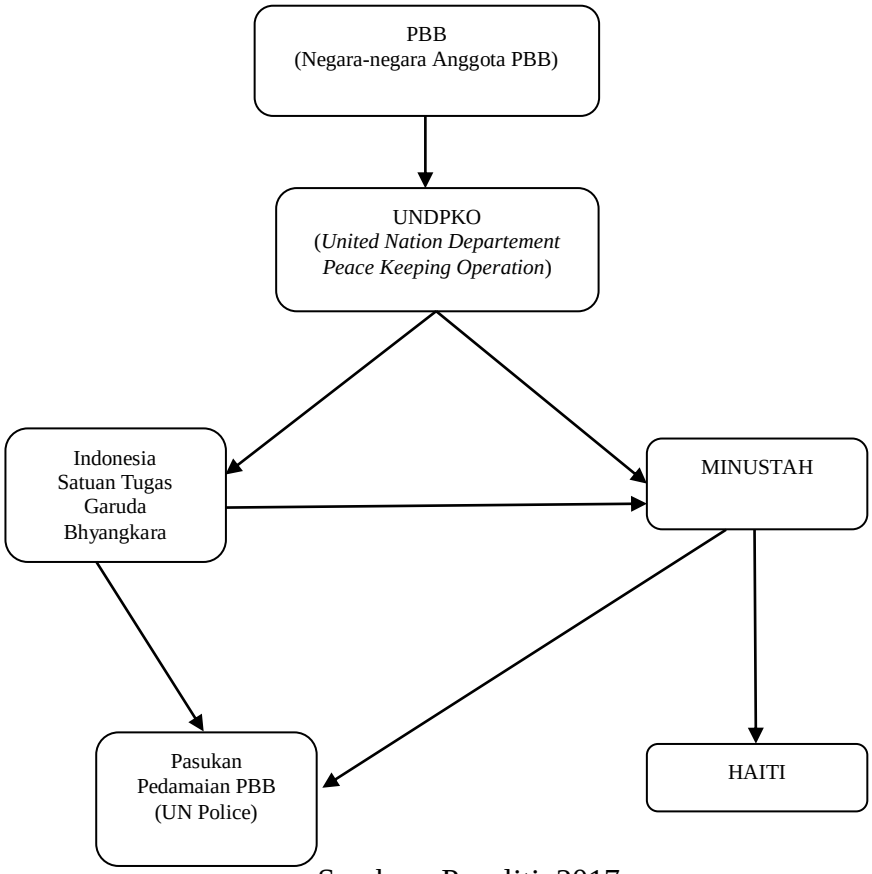
Kerangka pemikiran dalam melakukan pengamatan dan penganalisaan dari masalah yang diajukan dengan berlandaskan pada sejumlah teori dari pakar Hubungan Internasional yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh peneliti, maka untuk memudahkan peneliti menghubungkan kaitannya dengan Hubungan Internasional yang digunakan sebagai interaksi yang melibatkan lebih dari satu negara.

Pada penelitian tentang hubungan internasional kontemporer bukan hanya mempelajari hubungan politik antar negara-negara tetapi juga dengan sekelompok subjek lainnya yaitu dengan: interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, perusahaan transnasional, organisasi internasional, lingkungan hidup, gender, dan seterusnya. McClelland mendefinisikan hubungan internasional sebagai sebuah studi tentang interaksi antar jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (McClelland, 2011: 306).

Salah satu bentuk hubungan internasional adalah kerjasama internasional, kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Dougherty dan Pfaltzgraff, 2000: 419).

Kerjasama internasional pun dapat terwujud dalam berbagai macam *output* dan terbentuk dari kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, kebudayaan, sosial, keamanan, pertahanan, dan lingkungan hidup. Sehingga dapat memunculkan kepentingan yang beraneka ragam yang berdampak berbagai masalah sosial. Dalam mencari solusi atas berbagai masalah yang diakibatkan tersebut maka beberapa negara menjalin suatu kerjasama untuk mencari solusinya.

Peran Satgas Garuda Bhayangkaran melalui MINUSTAH dalam misi stabilitas PBB di Haiti dapat di rumuskan peneliti pada kerangka pemikiran sebagai berikut :



Sumber : Peneliti, 2017

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

E. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara definisi

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus penelitian lapangan dan studi literatur. Adapun penggunaan studi kasus dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

Penjelasan lainnya bahwa metode ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki, yang kemudian pada akhirnya metode ini digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang diteliti.

F. Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya – upaya dan kegiatan Satuan Tugas Garuda Bhayangkara pada Misi Stabilitas PBB di Haiti

United States Stabilization Mission in Haiti awalnya didirikan oleh Resolusi Dewan Keamanan 1542 tanggal 30 April 2004 untuk mendukung pemerintahan transisi dalam memastikan lingkungan yang aman dan stabil; untuk membantu dalam pemantauan, restrukturisasi dan mereformasi polisi nasional Haiti, untuk membantu dengan komprehensif dan berkelanjutan perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi *(Disarmament, Demobilization and Reintegration),* untuk membantu dengan pemulihan dan pemeliharaan aturan hukum, keselamatan publik dan ketertiban di Haiti, untuk melindungi personil Perserikatan Bangsa-Bangsa, fasilitas, instalasi dan peralatan dan untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik, untuk mendukung proses konstitusional dan politik, untuk membantu dalam mengorganisir, pemantauan dan melaksanakan pemilu bebas dan adil baik bagi Pemilu Parlemen maupun Presiden, untuk mendukung pemerintahan transisiHaiti, untuk mempromosikan dan melindungi HAM.

Pada tahun-tahun berikutnya, Mandat MINUSTAH diperbaharui oleh Dewan Keamanan PBB dengan menyesuaikan keadaan yang sedang terjadi di Haiti. Setelah bencana gempa bumi melanda Haiti pada 12 Januari 2010, DK PBB melalui resolusi

nomor 1908 tanggal 19 Januari 2010 dan nomor 1927 tanggal 4 Juni 2010 memberikat mandat kepada MINUSTAH untuk meningkatkan seluruh kekuatan guna mendukung pemulihan langsung, pembangunan dan stabilitas usaha serta meminta MINUSTAH untuk melanjutkan dan berkolaborasi dengan *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) dan tim negara PBB dalam mendukung usaha-usaha pemulihan kemanusiaan dan lebih lanjut mendorong semua aktor untuk terus terlibat dalam perencanaan bersama dan koordinasi di tingkat nasional dan lokal. Dewan Keamanan PBB juga mendorong MINUSTAH agar memberikan dukungan logistik dan keahlian teknis untuk membantu pemerintahan Haiti melanjutkan operasi untuk membangun kapasitas peraturan lembaga hukum di tingkat nasional dan lokal serta mempercepat pelaksanaan strategi transmigrasi pemerintah untuk pengungsi yang masih tinggal di IDP Camps *(Internally Displaced Person Camps)*. (Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Sebagai *Police Adviser* Pada United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) Kepolisian Republik Indonesia, Markas Besar Kontingen Garuda Bhayangkara MINUSTAH I, hlm. 12).

a. Satuan Tugas Garuda Bhayangkara I

Personil Polri dalam misi perdamaian PBB di Haiti bertugas sebagai *Police Adviser* sesuai dengan mandat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1542, Resolusi Nomor 1908, Resolusi Nomor 1927 dan diperbaharui dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1944 yang menyatakan untuk turut serta menciptakan dan memelihara lingkungan yang aman dan stabil, membantu proses politik (Pemilihan Umum Haiti) dan menciptakan penegakan HAM di Haiti

b. Satuan Tugas Garuda Bhayangkara II

Mandat yang diemban misi MINUSTAH bertujuan untuk mendukung pemerintah transisi dan memastikan lingkungan yang aman dan stabil, membantu dalam pemantauan, restrukturisasi dan mereformasi Kepolisian Nasional Haiti (PNH), membantu secara komprehensif dan berkelanjutan tentang pelucutan senjata, demobilisasi dan reintregasi (*Disarmament, Demobilization, and Reintegration*), membantu peulihan dan pemeliharaan aturan hukum, keselamatan publik dan ketertiban di Haiti, melindungi personil PBB, fasilitas, instalasi dan peralatan untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasn fisik, untuk mendukung proses konstitusional dan politik, untuk membantu dalan mngorganisir, pemantauan dan melaksanakan

pemilu bebas dan adil dan baik bagi pemilu parlemen maupun presiden, mendukung pemerintah transisi Haiti, mempromosikan dan melindungi HAM serta pemeliharaan lingkungan yang aman dan stanbil di Haiti.

2. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Tugas Satuan Garuda Bhayangkara Serta langkah-langkah penyelesaiannya

Dalam melaksanakan Misi Stabilitas di Haiti ini, Para personel Tugas Satuan Garuda Bhayangkata mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, akan tetapi Kendala tersebut tidak mengurangi semangat kinerja Satuan Garuda Bhayangkara dalam menjalankan Misi Stabilitas PBB di Haiti. Berikut Kendala dan hambatan yang di alami pada saat Pra penugasan dan pada saat penugasan serta langkah- langkah penyelesaiannya :

1. Pra Penugasan

Kendala yang di alami pada saat pra penugasan, yaitu:

1) Terbatasnya waktu dalam rangka persiapan keberangkatan ke daerah misi membuat pelaksanaan kursus bahasa Perancis yang diadakan Biro Misinter Divhubinter Polri bagi personil Polri yang akan berangkat ke Haiti menjadi kurang maksimal.
2) Kelengkapan logistik yang diterima masing-masing personil ada yang belum sesuai ukuran dan jenisnya antara lain baju dinas yang urang pas ukurannya, warna dan jenis rompi anti peluru yang tidak seragam, tidak adanya tongkat dan borgol.
3) Kurangnya kemampuan personil dalam bidang database, pemrograman dan kemampuan hardware maupun software.

2. Saat Penugasan

Kendala yang di alami pada saat penugasan, yaitu:

1) Sarana infrasrtuktur terutama di tempat penugasan belum memadai, seperti belum ada sarana internet, tempat tugas masih dalam bentuk tenda, tidak dilengkapi komputer dan sarana MCK yang kurang memadai mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak berjalan dengan lancar.
2) Penguasaan bahasa perancis dan bahasa Creol yang minim menjadi kendalaa bagi personil Polri saat melaksanakan tugas.

3) Kurangnya pemahaman personil Satga Garuda Bhayangkara tentang mandat UN Police sehingga sering dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan lebih sebagai tim inspeksi dari pada pendamping.

3. Langkah-langkah untuk menyelesaikan kendala yang ada

a. Mengingat telah terjadi beberapa percobaan maupun tindakan kekerasan yang dialami oleh personil *MINUSTAH*, maka sebaiknya dalam pelaksanaan pelatihan maupun pembekalan kepada para calon *UNPOL* diberikan tentang materi pengamanan terhadap personil, bahan keterangan maupun materiil sehingga pengamanan perseorangan dapat dilakukan secara maksimal.

b. Dalam pembekalan juga perlu diberikan materi tentang ilmu komunikasi dan tata etika dalam bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Banyaknya kejadian yang dialami oleh personil *MINUSTAH* juga merupakan akibat dari tingkah laku yang kurang berkenan dengan masyarakat sekitar. Kedua hal diatas perlu mendapat perhatian khusus sebelum para calon *UNPOL* tersebut diberangkatkan ke daerah misi.

c. Penggunaan bahasa Perancis sangat diperlukan dalam misi *MINUSTAH*. Pembekalan tentang bahasa Perancis perlu tetap dilakukan dan ditambah kuantitas jam pelajaran agar memberikan modal pengetahuan dan kemudahan bagi calon *UNPOL* pada misi *MINUSTAH* Haiti.Ditambahkan pula pengenalan tentang kemampuan bahasa *Creol* Haiti.

3. Kondisi stabilitas keamanan di Haiti setelah datangnya Satgas Garuda Bhayangkara

Keterlibatan personil kepolisian republik Indonesia pada misi penjagaan perdamaian dunia yang di selenggarakan oleh PBB sudah berlangsung lama, berbagai masalah telah mereka rasakan baik secara fisik maupun mental. Seiring berjalannya waktu kontribusi polri mulai menunjukan hasil yang signifikan, tetapi hal ini bukan merupakan puncak dari segala yang diharapkan . Masih banyak masalah-masalah baik itu secara personal maupun satuan. Tetapi masalah-masalah ini seiring dengan perubahan waktu, dan perkembangan zaman, maka perlu dibuat penyelesaian yang baru dan relevan dan efektif serta efisien sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan baik.

Berikut hasil yang dicapai oleh satgas Garuda Bhayangkara yang menggambarkan kondisi stabilitas keamaan di Haiti setelah kedatangan satgas tersebut, yaitu:

1. **Hasil Yang Dicapai oleh Satgas Garuda Bhayangkara I**

Selama melaksanakan tugas di misi MINUSTAH, Satuan Tugas Garuda Bhayangkara I dapat menjalankan fungsi dan peranannya dengan lancar. MINUSTAH telah memberikan apresiasi yang tinggi kepada kontingen Polri, baik pada kegiatan operasional mapun staff. Hal itu di sampaikan langsung oleh MINUSTAH *Police Commisioner, Chief Superintendent* Marc Tardif dalam kata sambutannya pada upacar penyerahan mendali PBB (*UN Medal*) pada tanggal 6 Juni 2011.

2. **Hasil Yang Dicapai oleh Satgas Garuda Bhayangkara II**

Keberadaan Satuan Tugas Garuda Bhayangkara pada misi pemeliharaan perdamaian PBB di Haiti (MINUSTAH) mendapatkan apresiasi dan penilaian positif dari *Police Commisioner* selaku pimpinan UNPOL di MINUSTAH. Hal ini di karenakan tidak adanya pelanggaran yang di lakukan oleh para personil Satgas Garuda Bhayangkara selama bertugas di Haitim profesional dan disiplin dalam bertugas serta menunjukan kinerja yang bagus yang dibuktikan dengan peniliaian pimpinan dan rekan kerja.

Sehubung dengan berakhirnya masa penugasan Satgas Garuda Bhayangkara II di MINUSTAH, terdapat keinginan pimpinan UNPOL di MINUSTAH untuk memperpanjang masa penugasan personil Satgas Garuda Bhayangkara II yang bertugas saat itu sampai menunggu kedatangan kontingen pengganti dengan pertimbangan kinerja yang baik dan masih dibutuhkan di unit kerja masing-masing.

3. **Hasil Yang Dicapai oleh Satgas Garuda Bhayangkara III**

Kegiatan operasional secara umum Satgas Garuda Bhayangkara III MINUSTAH berjalan lancar sesuai mandat MINUSTAH yaitu mendukung kegiatan pemerintahan maupun *Police National Haiti* (PNH) dalam rangka pengembangan kemampuan dan perbaikan tugas PNH guna melindungi dan melayani masyarakat Haiti sesuai moto PNH yaitu *Proteger et Servir*.

Pelaksanaan penugasan sebagai Satuan Tugas Garuda Bhayangkara III dapat dilaksanakan dengan baik, menjaga etika profesional, menunjukan integritas yang tinggi

dan selalu menghormati serta menjungjung tinggi keberagaman. Menghindari segala bentuk pelanggaran dan menjaga nama baik POLRI dan Indonesia dimata dunia dengan menghindari segala macam bentuk pelanggaran. *Zero tolerance* terhadap *Sexual Exploitation and Abuse and Discrimination*.

Melihat keberhasilan personil polri yang ditugaskan sebagai *Police Adviser* diberbagai misi penjagaan perdamaian dunia, termasuk Minustah. Ditandai dengan berbagai apresiasi baik dari *Host Country* maupun dari Negara mitra, ditempatkannya beberapa personil dari Polri di sektor-sektor penting serta berakhirnya masa tugas tanpa ada pelanggaran sedikitpun serta terselesaikannya mandat yang dikeluarkan oleh dewan keamanan. Keberhasilan Personil Polri pada beberapa misi adalah karena komitmen Indonesia yang kuat untuk menjaga eksistensi dalam berpolitik luar negeri bebas dan aktif .

Dukungan pemerintah Indonesia yang terus meningkat mempengaruhi keberhasilan Polri dalam melaksanakan amanatnya dalam menjaga perdamaian dunia pada beberapa misi. Jumlah perwira polri yang terus meningkat serta dibangunya fasilitas untuk pelatihan yang dikhususkan untuk persiapan personil penjaga perdamaian juga berpengaruh pada masa depan polri dalam kiprahnya di dunia internasional.

G. Kesimpulan

Berdasarkan keberhasilan yang telah dicapai oleh polri, serta kekuatan dan peluang yang dimiliki, maka dapat disimpulkan bahwa prospek keterlibatan personil polri akan terus dibutuhkan oleh PBB sampai pada suatu jenjang tertentu sehingga personil polri dapat menghadapi persaingan dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buzan, Barry. 1983. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Hempstead:* Harvester Wheatsheaf.

Fidler, David P. 2009. *Health In Foreign Policy: An Analytical Overview*. Political Journal. Vol.15. No. 3. United Kingdom: Taylor & Francis Ltd.

Holsti, K.J. 1992. *Politik Internasional Suatu Keranngka Analisis*, Terjemahan Wawan Juwanda. Bandung : Bina Cipta.

Jakarta: Cipta Manunggal.

James N. Rosenau, Gavin Boyd dan Kenneth W. Thompson. *World Politics : An Introduction.*

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

John T. Rourke, John. 1995. *Internasional Politics on The World Stage*. Dushkin Publishing Group,Conecticut.

Kartasasmita, Koesnadi. 2004. *Organisasi dan Administrasi Internasional.* Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.

Kunarto . 1997 , Tri Brata dan Catur Prasetya : *Sejarah-Perspektif & Prospeknya*, Jakarta : Cipta Manunggal

Kunarto . 1999. *Polri mandiri : Merenungi kritik Terhadap Polri Buku ke II*

Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal.

Kusumaatmaja, Mochtar. 1983. *Politik Luar Negeri dan pelaksanaanya*. Bandung : Alumni Bandung.

Mabes Polri. 1999. *Sejarah Kepolisian di Indonesia: Cetakan Pertama* . Jakarta:Mabes Polri.

Muhaimin, Yahya A. 2008. *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Perwita, A.A. Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2014. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda.

Rudy, Teuku May. 1993. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung : Penerbit Angkasa.

Rudy, Teuku May. 1998. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung : Eresco.

Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogyakarta.

Syahmin, A.K. 1985. *Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Bina Cipta.

Jurnal Dan Karya Tulis Ilmiah

Khairani, Rizka. 2014. *"The Peacekeeping Deployment Of Minustah In Haiti"*, http://repository.unair.ac.id/17859/

Widodo, Slamet. 2013. *"Peran Serta Polisi Republik Indonesia / Fpu (Formed Police Unit) Dalam Misi Perdamaian Dunia Dibawah Mandat PBB Untuk*

Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Di Darfur Sudan”, http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8821

Data dari jurnal Library of Congress - Federal Research Division